



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



**DOKUMEN
MANAJEMEN RISIKO
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dokumen manajemen risiko ini berisi tentang hasil pelaksanaan penilaian risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko. Dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Dengan telah disusunnya dokumen penilaian risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran penetapan kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaanya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan penilaian risiko ini

Demikian dokumen manajemen risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2026 ini dibuat agar dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan.

Penajam, 17 Desember 2025

Kepala DPMD,



Tita Deritayati, S.Sos., MM
NIP.19690404 198903 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
TIM MANAJEMEN RISIKO.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Dasar Hukum.....	
C. Tujuan.....	
D. Ruang Lingkup.....	
E. Metodologi	
F. Sistematika Laporan	
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS.....	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	
B. Visi dan Misi	
C. Tujuan dan Sasaran	
D. Strategi dan Kebijakan	
E. Rencana Program dan Kegiatan Utama	
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kriteria Pengukuran dan Dampak.....	
B. Register Risiko.....	
C. Peta Risiko.....	
BAB IV RENCANA TINDAK PENEGDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	
B. Rekomendasi.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 13 dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah dengan melakukan penilaian pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa pondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan dan sasaran kerja tahunannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 31;
10. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Tatalaksana, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Peraturan Bupati No 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700/94/2023 Tentang Perencanaan Pembinaan, Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya penilaian resiko pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur kedua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan;
2. Untuk mendapatkan risk register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan;
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi kegiatan di

lingkungan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi :

1. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara baik pada hasil identifikasi risiko dan analisis risiko, secara kualitatif, sedangkan Teknik yang digunakan adalah wawancara dan telaah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

F. Sistematika Pelaporan

Laporan penilaian risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Dalam bab ini diberikan penjelasan terkait kriteria pengukuran dan dampak risiko, register risiko dan peta risiko pada kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan hasil penilaian resiko yang telah dilaksanakan dan rekomendasi tindak pengendalian risiko.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 yaitu Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1.1. Tugas :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemerintahan Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Fasilitasi Pemerintahan Desa.

1.2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

3. Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Pembinaan Pejabat Fungsional;
6. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.

Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial

Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat yang meliputi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan TTG, Usaha Pemberdayaan, Kelembagaan Masyarakat, SDA dan Pembangunan Kawasan Pedesaan serta Pendataan dan Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya masyarakat membawahkan :

1. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan TTG;
2. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Usaha Pemberdayaan, Kelembagaan Masyarakat, SDA dan Pembangunan Kawasan Pedesaan;
3. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Pendataan dan Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pemerintahan Desa yang meliputi Penataan, Perkembangan Administrasi Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta Kelembagaan, Kerjasama dan Kapasitas Aparatur.

Bidang Pemerintahan Desa membawahkan :

1. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda, Perkembangan Administrasi Desa;
2. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
3. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Kapasitas Aparatur.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
- b) Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang memadai;
- c) Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa;
- d) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat desa;
- e) Meningkatkan peran perempuan dalam Pembangunan.

2. Sasaran

- a) Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan;
- b) Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang sesuai peraturan yang berlaku;
- c) Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat;
- d) Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam menunjang program pembangunan desa;
- e) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di desa dan kelurahan.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara adalah strategi dan kebijakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi dan kebijakan dalam Renstra di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

- Strategi

- a) Peningkatan peran, partisipasi dan swadaya masyarakat;
- b) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam pembangunan;
- c) Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat;
- d) Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan;
- e) Peningkatan kapasitas pemerintah Desa Pemerintah Kelurahan;
- f) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- g) Pemberdayaan masyarakat miskin yang berkelanjutan;
- h) Mendorong terbangunnya hubungan kerja yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai embrio terbentuknya Pemerintahan Desa yang demokratis;
- i) Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dan kelurahan;
- j) Peningkatan kualitas SDM aparatur;
- k) Peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

D. Rencana Program dan Kegiatan Utama

1. Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan oleh di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 2. PROGRAM PENATAAN DESA**
- 3. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**

- 4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
- 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

2. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari Program Kerja Pengawasan Tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam LKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian/keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah, baik secara kualitatif maupun Kuantitatif.

Adapun kegiatan-kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

20. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
21. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan;
22. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
25. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
26. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
27. Fasilitas Penyusunan Profil Desa;
28. Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa;
29. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
30. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
31. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
32. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
33. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
34. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
35. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
36. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kriteria Pengukuran dan Dampak

Sebelum melakukan penilaian risiko dimulai, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria dan skala dampak dan kemungkinan yang akan digunakan. Berikut kriteria kemungkinan dan skala dampak :

1. Matrik Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	NILAI
Sangat jarang terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 5 tahun atau lebih	1
Jarang terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 4 tahun	2
Hampir / pasti terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 3 tahun	3
Sering terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 2 tahun	4
Sangat sering terjadi	Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 1 tahun	5

Tabel 3.1. Matrik tingkat kemungkinan

2. Matrik Tingkat Dampak Terjadinya Risiko

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	NILAI
Sangat rendah	a. Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. b. Tidak mengganggu pelayanan. c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pelaksana. d. Tidak ada kerugian material.	1
Rendah	a. Tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. b. Agak mengganggu pelayanan. c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat Esselon IV. d. Kerugian kurang material.	2
Sedang	a. Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. b. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat Esselon III. d. Mengganggu administrasi program. e. Kerugian material cukup besar bagi organisasi maupun keuangan.	3

Tinggi	a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan. b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari. c. Mengancam terhambatnya program. d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan Unit Kerja. e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.	4
Sangat Tinggi	a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan. b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari. c. Mengancam terhambatnya program. d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan Unit Kerja. e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.	5

Tabel 3.2. matrik tingkat dampak.

3. Matrik Tingkat Risiko Ditentukan Berdasarkan Tingkat Dampak Terjadinya Risiko (Analisis Risiko)

Matrik Analisis Risiko			Konsekuensi / Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Kurang signifikan	Signifikan tinggi	Sangat signifikan	Ekstrem
Kemungkinan	5	Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Hampir pasti terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kemungkinan besar terjadi	3	6	9	12	15
	2	Kemungkinan kecil terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir mustahil terjadi	1	2	3	4	5

Tabel 3.3. Matrik peta risiko.

Keterangan

Warna Biru : Sangat rendah, risiko dapat diterima

Warna hijau : Rendah, risiko dapat diterima

Warna kuning : Sedang, risiko dapat diterima

Warna orange : Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

Warna merah : Sangat tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan prioritas

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan.

B. Register Risiko

Penyusunan register risiko terkait dengan kegiatan pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 dan total anggaran sebesar Rp5.877.320.363,- terdiri dari 5 Program Kegiatan yaitu,

No.	Program Kegiatan	Total Anggaran (Rp)
1	Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4.605.691.147,70
2	Program Penataan Desa	29.856.600
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	703.140.000
4	Program Peningkatan Kerja sama Desa	219.995.000
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	318.637.615,30
Total Anggaran		5.877.320.363

Tabel 3.4. Program kegiatan yang di sampel penilaian risiko

Dalam penyusunan register risiko ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penilaian risiko pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1 . Program Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026						Total Anggaran : Rp5.877.320.363- (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)				
No .	Program	Pagu Anggaran Program	Risiko Program	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.605.691.147,70	Terhambatnya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Internal	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	DPMD	2	3	6	Rendah/Risiko dapat diterima
2.	Program Penataan Desa	Rp29,856,600.00	Terhambatnya program penataan Desa	Internal	1. Kelengkapan administrasi belum terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan 2. Perubahan Kebijakan terkait usulan Pembentukan,	DPMD/ DESA	3	4	12	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

					Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 3. Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara					
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp219.995.000	Rendahnya partisipasi desa dalam kerjasama	Internal	1. Kurangnya pemahaman desa terkait kerja sama serta manfaat 2. Kurangnya Jumlah dan kapasitas SDM 3. Kurangnya Koordinasi 4. Potensi konflik kepentingan antar desa	DPMD/DESA	3	3	9	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp703,140,000.00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kurang Optimal	Internal	1. Perubahan regulasi yang dinamis, 2. pendampingan , monitoring dan evaluasi kurang optimal, 3.	DPMD/DESA	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

					Implementasi dan tindak lanjut administrasi pemerintahan desa, 4. Ketersedian Anggaran, 5. Keterbatasan Kapasitas SDM aparatur Desa dan anggota BPD .					
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp318.637.615,30	Koordinasi antar lembaga kemasyarakatan belum optimal	Internal	1. Kurangnya forum komunikasi publik antar lembaga 2. Rendahnya minat dan kepercayaan terhadap kelembagaan 3. Perbedaan cara pandang terhadap lembaga adat dan masyarakat hukum adat	DPMD/ DESA	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

Tabel. 3.5 Penilaian Risiko Program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Progam Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten,

Pada kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki risiko yang di tunjukkan pada tabel berikut.

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Total Anggaran : Rp98.300.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)				
No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18,100,000.00	Dokumen yang tersusun tidak tepat waktu	Internal	1. Gangguan sistem aplikasi / jaringan 2. Pemenuhan data tidak sesuai waktu/deadline 3. Perubahan kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu Kondisi tertentu 4. Keterbatasan SDM Pengelola	DPMD	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp80,200,000.00	Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Internal	Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi yang belum dilaksanakan secara optimal	DPMD	3	2	6	Rendah/Risiko dapat diterima

Tabel 3.6 Penilaian Risiko Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Total Anggaran : Rp3.319.410.164,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)				
No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,182,695,164.00	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan dan Terjadinya perubahan data ASN (mutasi data)	Internal	Gangguan sistem aplikasi / jaringan	Pegawai DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp129,840,000.00	Keterlambatan pembayaran honorarium	Internal	Gangguan sistem aplikasi / jaringan	Pegawai DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp6,875,000.00	Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD belum optimal	Internal	Perubahan Kebijakan perencanaan keuangan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu kondisi tertentu	Pegawai DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

Tabel 3.7 Penilaian Risiko Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						Total Anggaran : Rp284.378.927,70,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Rupiah)				
No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6,044,919.00	Tidak terpenuhinya sarana pendukung instalasi listrik	Internal	adanya keterlambatan dalam penanganan pada perangkat listrik yang rusak	DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp126,770,500.00	Tidak Terpenuhinya ATK pendukung administrasi perkantoran	Internal	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	DPMD	3	2	6	Rendah/ Risiko dapat di terima
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp5,145,496.00	Tidak Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Internal	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	DPMD	2	3	6	Rendah/ Risiko dapat di terima
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp19,137,000.00	Tidak Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Internal	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	DPMD	2	3	6	Rendah/ Risiko dapat di terima

5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3,060,000.00	Tidak tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Internal	Kurangnya jenis bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	DPMD	2	2	4	Rendah/ Risiko dapat di terima
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp38,000,000.00	Tidak terpenuhinya fasilitas makan minum tamu	Internal	Intensitas kunjungan tamu tidak terukur	DPMD	3	2	6	Rendah/ Risiko dapat di terima
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp86.221.012,70	1. Rapat tidak terselenggara 2. Tidak dapat menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi	Internal	Klasifikasi urgensi kegiatan	DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

Tabel 3.8 Penilaian Risiko Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Total Anggaran : Rp0,- (Nol Rupiah)				
No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0.00	Belum tersedianya barang yang sesuai spesifikasi	Internal	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

Tabel 3.9 Penilaian Risiko Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Total Anggaran : Rp796.167.416,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)				
No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5,154,800.00	Pengadaan Materai tidak dapat terealisasi lengkap sesuai kebutuhan	Internal	Intensitas kebutuhan materai tidak terprediksi	DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp92,262,616.00	1. Gangguan internet 2. Air tidak mengalir 3. Pemadaman Listrik	Internal	Keterlambatan pembayaran tagihan	DPMD	2	4	8	Sedang/ Risiko dapat di terima
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp698,750,000.00	Keterlambatan pembayaran honorarium THL	Internal	Gangguan sistem aplikasi / jaringan dan Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal permintaan jasa pelayanan kantor	DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

Tabel 3.10 Penilaian Risiko Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Total Anggaran : Rp107.434.640,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)				
No .	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp78,734,640.00	Sarana dan prasarana kendaraan dinas belum optimal	Internal	Pengawasan Pemeliharaan kendaraan dinas secara periodik belum optimal	DPMD	4	3	12	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28,700,000.00	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor belum optimal	Internal	Pengawasan Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor secara periodik belum optimal	DPMD	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0.00	Pemeliharaan gedung kantor belum optimal	Internal	Pengawasan Pemeliharaan gedung kantor secara periodik belum optimal	DPMD	2	3	6	Rendah/ Risiko dapat di terima

Tabel 3.11 Penilaian Risiko Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki risiko yang di tunjukkan pada tabel berikut.

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa						Total Anggaran : Rp29.856.600,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)				
No .	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan , dan Perubahan Status Desa	Rp29,856,600.00	terhambatnya proses Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan , dan Perubahan Status Desa	Internal	1. Kelengkapan administrasi belum terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan 2. Perubahan Kebijakan terkait usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan , dan Perubahan Status Desa 3. Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	DPMD/ DESA	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

Tabel 3.12 Penilaian Risiko Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Desa dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki risiko yang di tunjukkan pada tabel berikut.

Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa						Total Anggaran : Rp219.995.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)				
No .	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp219.995.000	Belum optimalnya pengembangan kerjasama desa	Internal	1. Belum optimalnya terkait data dan informasi 2. Pendampingan dan pembinaan dilaksanakan belum optimal 3. SDM Manajerial tingkat desa belum optimal dalam perumusan strategi pengembangan perdesaan	DPMD dan Desa	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

Tabel 3.13 Penilaian Risiko Kegiatan Fasilitas Kerjasama Desa

4. Program Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki risiko yang di tunjukkan pada tabel berikut :

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Total Anggaran : Rp703.140.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)				
No .	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp594,000,000.00	1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum optimal 2. Keterlambatan pembayaran premi bulanan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Internal	1. Monitoring dan evaluasi belum optimal 2. Gangguan sistem aplikasi / jaringan 3. Besaran Premi bersifat fluktuatif	desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp10,140,000.00	Pelaksanaan fasilitasi keuangan desa belum optimal	Internal	1. Monitoring dan evaluasi belum optimal 2. Pendampingan Tim ADD belum optimal 3. Perubahan regulasi keuangan desa	Desa	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya

					4. Perkembangan aplikasi Siskeudes 5. Penyusunan laporan keuangan desa yang belum tertib 6. Kapasitas Aparatur desa belum memadai					
3.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp0.00	Kapasitas aparatur pemerintah desa belum optimal	Internal	1. Perubahan regulasi yang dinamis 2. Mutasi dan pergantian aparatur perangkat desa yang dinamis 3. Keterbatasan anggaran pada OPD dalam pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4. Implementasi dan tindak lanjut hasil kapasitas aparatur pemerintah desa belum optimal	Desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp0.00	Struktur organisasi kurang efektif	Internal	kurangnya kapasitas manajerial dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha	DPMD dan desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
5.	Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp0.00	Proses Penyelenggaraa n pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berjalan dengan lancar	Internal	1. Sosialisasi dan pendampingan yang belum optimal 2. Kurangnya koordinasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala desa 3. Kondusifitas pelaksanaan Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD dan desa	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penangan an selanjutnya
6.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp0.00	Hasil Analisis Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa dan SOTK Perangkat Desa Belum Optimal	Internal	1. Sosialisasi dan pendanaan anggaran Belum Optimal 2. Gangguan sistem aplikasi / jaringan 3. Kapasitas SDM belum optimal	DPMD dan desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

					4. Perangkat Kerja belum optimal					
7.	Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	Rp99,000,000.00	Pelaksanaan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Belum Optimal	Internal	1. Sosialisasi dan pendampingan belum optimal 2. Pendanaan Anggaran belum optimal 3. Kapasitas SDM belum optimal 4. Perangkat Kerja belum optimal	DPMD dan desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima
8.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp0.00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa belum optimal	Internal	1. Monitoring dan evaluasi belum optimal 2. Perubahan regulasi aset desa 3. Implementasi aplikasi sipades 4. Penyusunan laporan aset desa yang belum tertib 5. Kapasitas Aparatur desa belum memadai	Desa	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya
9.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp0.00	Kapasitas Anggota BPD belum optimal	Internal	1. Perubahan regulasi yang dinamis 2. Pergantian anggota BPD	Desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

					yang dinamis 3. Keterbatasan anggaran pada OPD dalam pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD 4. Implementasi dan tindak lanjut hasil kapasitas anggota BPD belum optimal					
10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp0	1. Evaluasi perkembangan desa belum optimal 2. Tahapan pelaksanaan lomba yang belum optimal	Internal	1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan lomba desa 2. Sosialisasi dan pembinaan yang belum optimal 3. Penginputan aplikasi Epdeskel yang belum tertib	DPMD dan desa	3	3	9	Sedang/ Risiko dapat di terima

Tabel 3.14 Penilaian Risiko Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

5. Program Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki risiko yang di tunjukkan pada tabel berikut:

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						Total Anggaran : Rp318.637.615,30,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Koma Tiga Puluh Rupiah)				
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Sub Kegiatan	Sumber Risiko (Internal/Eksternal)	Faktor penyebab Risiko	Pihak yang terdampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Status Risiko	Deskripsi status risiko
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tauran), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp0.00	Pelaksanaan Kapasitas LKD Belum Optimal	Internal	1. Sosialisasi dan Pendampingan Belum Optimal 2. Kapasitas SDM Belum Optimal 3. Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Peran LKD Belum Optimal 4. Pendanaan Anggaran belum optimal	DPMD dan Desa	4	4	16	Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya
2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Rp0.00	Pendapatan Asli Desa Belum Optimal	Internal	1. Pendampingan Pengembangan	DPMD dan Desa	2	4	8	Sedang, risiko dapat diterima

	Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				n Potensi Desa Belum Optimal 2. Kapasitas SDM Pengerak Ekonomi Desa Belum Optimal 3. Dalam Perencanaan Usaha Desa/Kelurahan Belum Optimal					
3.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp0.00	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum Optimal	Internal	1. Pola pembinaan berjenjang tidak dilaksanakan secara maksimal 2. Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Belum Optimal 3. Teknologi Tepat Guna belum dimanfaatkan secara	DPMD dan Desa	2	4	8	Sedang, risiko dapat diterima

					Optimal 4. Dukungan Anggaran dalam mendukung penyempurnaan Teknologi Tepat Guna belum optimal					
4.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp0.00	Pelaksanaan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Belum Optimal	Internal	1.Sosialisasi dan pendampingan belum optimal 2. Pendanaan Anggaran belum optimal 3. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan Belum Optimal 4. Menurunnya Semangat Gotong Royong dan Kebersamaan (Pergeseran	DPMD dan Desa	3	3	9	Sedang, risiko dapat diterima

					Pola Sosial Budaya Masyarakat) 5. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Belum Optimal					
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp318.637.615,30	Pelaksanaan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Belum Optimal	Internal	1. Pendampingan Kegiatan Belum Optimal 2. Peningkatan Kapasitas SDM Belum Optimal	DPMD dan PKK	3	3	9	Sedang, risiko dapat diterima

Tabel 3.15 Penilaian Risiko Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya berdasarkan penilaian tingkat kemungkinan dan tingkat dampak diatas dapat di analisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Kegiatan Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara seperti terlihat pada tabel berikut adalah daftar risiko yang ada.

Daftar Risiko (Risk Register)

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Total Anggaran : Rp98.300.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)			
No .	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18,100,000.00	Dokumen yang tersusun tidak tepat waktu	Sekretariat DPMD	1. Gangguan sistem aplikasi / jaringan 2. Pemenuhan data tidak sesuai waktu/deadline 3. Perubahan kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu Kondisi tertentu 4. Keterbatasan SDM Pengelola	Pekerjaan tim perencanaan jadi terhambat, Ketidak selarasan antar Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) dan terhambatnya pencapaian tujuan yang telah disusun dalam 2 dokumen perencanaan	Mengajukan Peningkatan kapasitas SDM dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp80,200,000.00	Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	DPMD	Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi yang belum dilaksanakan secara optimal	Tidak Optimalnya Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam evaluais kinerja DPMD

Table 3.16 Daftar Risiko Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Total Anggaran : Rp3.319.410.164,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)			
No .	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,182,695,164.00	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan dan Terjadinya perubahan data ASN (mutasi data)	Keuangan	Gangguan sistem aplikasi / jaringan	Pegawai jadi kurang bersemangat dalam bekerja	Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kendala yang ada
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp129,840,000.00	Keterlambatan pembayaran honorarium	Keuangan	Gangguan sistem aplikasi / jaringan	Pegawai jadi kurang bersemangat dalam bekerja	Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kendala yang ada dan Menyiapkan Dokumen Pengajuan Sedini Mungkin
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp6,875,000.00	Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD belum optimal	Keuangan	Perubahan Kebijakan perencanaan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu kondisi tertentu	Minimnya rapat internal mengenai laporan keuangan	Memberikan Pemahaman kepada para PPTK untuk segera melakukan Kegiatan sesuai dengan Jadwal

Table 3.18 Daftar Risiko Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				Total Anggaran : Rp284.378.927,70,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Rupiah)			
N o.	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6,044,919.00	Tidak terpenuhinya sarana pendukung instalasi listrik	Sekretariat	adanya keterlambatan dalam penanganan pada perangkat listrik yang rusak	adanya perangkat listrik yang tidak dapat berfungsi serta kemungkinan terjadinya konsleting listrik	Melakukan kontrol berkala terhadap kebutuhan komponen instalasi listrik
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp126,770,500.00	Tidak Terpenuhinya ATK pendukung administrasi perkantoran	Sekretariat	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp5,145,496.00	Tidak Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Sekretariat	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp19,137,000.00	Tidak Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat	Belum terdaftarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga	tidak tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal untuk kegiatan Penyediaan Jasa

					sulit dalam proses belanja daring.		Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3,060,000.00	Tidak tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat	Kurangnya jenis bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	tidak tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah referensi jenis bahan bacaan dan buku peraturan terkait DPMD
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp38,000,000.00	Tidak terpenuhinya fasilitas makan minum tamu	Sekretariat	Intensitas kunjungan tamu tidak terukur	kegiatan banyak dilakukan di kantor Bupati	melakukan renovasi ruang rapat
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp86.221.012,70	1. Rapat tidak terselenggara 2. Tidak dapat menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi	Sekretariat	Klasifikasi urgensi kegiatan	Kurangnya koordinasi antar bidang dapat menyebabkan pelaksanaan setiap kegiatan tidak berjalan dengan baik	Mengadakan/mengikuti rapat via zoom jika memungkinkan

Table 3.19 Daftar Risiko Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Total Anggaran : Rp0,- (Nol Rupiah)			
No.	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0.00	Belum tersedianya barang yang sesuai spesifikasi	Sekretariat	Belum terdaptarnya penyedia dalam katalog lokal, sehingga sulit dalam proses belanja daring.	barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal

Table 3.20 Daftar Risiko Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Total Anggaran : Rp796.167.416,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)			
No.	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5,154,800.00	Pengadaan Materai tidak dapat terealisasi lengkap sesuai kebutuhan	Sekretariat	Intensitas kebutuhan materai tidak terprediksi	Pekerjaan jadi tidak maksimal	Menghemat penggunaan ATK
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp92,262,616.00	1. Gangguan internet 2. Air tidak mengalir 3. Pemadaman Listrik	Sekretariat	Keterlambatan pembayaran tagihan	Pekerjaan jadi terhambat	Membuat pengingat agar pembayaran tagihan tidak terlambat
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp698,750,000.00	Keterlambatan pembayaran honorarium THL	Sekretariat	Gangguan sistem aplikasi / jaringan dan Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal permintaan jasa pelayanan kantor	Pegawai jadi kurang bersemangat dalam bekerja	Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kendala yang ada

Table 3.21 Daftar Risiko Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Total Anggaran : Rp107.434.640,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)			
N o.	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp78,734,640.00	Sarana dan prasarana kendaraan dinas belum optimal	Sekretariat	Pengawasan Pemeliharaan kendaraan dinas secara periodik belum optimal	Kendaraan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan anggaran pengeluaran lebih besar untuk membayar denda	Membuat pengingat agar pembayaran pajak tidak terlambat, serta mengecek secara berkala kondisi kendaraan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28,700,000.00	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor belum optimal	Sekretariat	Pengawasan Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor secara periodik belum optimal	Peralatan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	Mengecek kondisi peralatan secara berkala dan menggunakan peralatan dengan bijak
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0.00	Pemeliharaan gedung kantor belum optimal	Sekretariat	Pengawasan Pemeliharaan gedung kantor secara periodik belum optimal	Jika terjadi kerusakan gedung, akan menghambat kinerja pegawai	Mengecek kondisi gedung secara berkala dan rutin melakukan pemeliharaan

Table 3.22 Daftar Risiko Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa				Total Anggaran : Rp29.856.600,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)			
No .	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Pembentukan , Penghapusan , Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp29,856,600.00	terhambatnya proses Pembentukan , Penghapusan , Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Bidang PEMDE S	1. Kelengkapan administrasi belum terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan 2. Perubahan Kebijakan terkait usulan Pembentukan , Penghapusan , Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 3. Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	Tidak tercapainya target kinerja	Melengkapi administrasi dan menyesuaikan perubahan kebijakan dan regulasi.

Table 3.23 Daftar Risiko Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

8. Fasilitas kerja Sama Desa

Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa				Total Anggaran : Rp219.995.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)			
No .	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp219.995.000	Belum optimalnya pengembangan kerjasama desa	Bidang PKSB M	1. Belum optimalnya terkait data dan informasi 2. Pendampingan dan pembinaan dilaksanakan belum optimal 3. SDM Manajerial tingkat desa belum optimal dalam perumusan strategi pengembangan perdesaan	Tidak tercapainya target kinerja	1. Pengumpulan dan pengolahan Data 2. Kunjungan kerja serta Monitoring dan evaluasi lapangan 3. Pelaksanaan Pendampingan dan Pembinaan

Table 3.24 Daftar Risiko Kegiatan Fasilitas Kerjasama Desa

9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				Total Anggaran : Rp703.140.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)			
No .	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp594,000,000.00	1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum optimal 2. Keterlambatan pembayaran premi bulanan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bidang Pemdes	1. Monitoring dan evaluasi belum optimal 2. Gangguan sistem aplikasi / jaringan 3. Besaran Premi bersifat fluktuatif	Tidak tercapainya target kinerja	1. mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, 2. meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp10,140,000.00	Pelaksanaan fasilitasi keuangan desa belum optimal	Bidang Pemdes	1. Monitoring dan evaluasi belum optimal 2. Pendampingan Tim ADD belum optimal 3. Perubahan regulasi keuangan desa 4. Perkembangan aplikasi Siskeudes 5. Penyusunan laporan keuangan desa yang belum tertib 6. Kapasitas Aparatur desa belum memadai	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, 2. Mengoptimalkan pendampingan tim ADD, 3. Penyesuaian regulasi keuangan Desa, 4. Menertibkan laporan penyusunan keuangan desa, 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa
3.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp0.00	Kapasitas aparatur pemerintah desa belum optimal	Bidang Pemdes	1. Perubahan regulasi yang dinamis 2. Mutasi dan pergantian aparatur perangkat desa yang dinamis 3. Keterbatasan anggaran pada OPD dalam pembinaan Peningkatan	Tidak tercapainya target kinerja	Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa

					Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4. Implementasi dan tindak lanjut hasil kapasitas aparatur pemerintah desa belum optimal		
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp0.00	Struktur organisasi kurang efektif	Bidang PKSB M	kurangnya kapasitas manajerial dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha	Tidak tercapainya target kinerja	Memfasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdes dan Lembaga Kerja
5.	Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp0.00	Proses Penyelenggaraa n pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berjalan dengan lancar	Bidang Pemde s	1. Sosialisasi dan pendampingan yang belum optimal 2. Kurangnya koordinasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala desa 3. Kondusifitas pelaksanaan Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalka n sosialisasi dan pendampingan, 2. Meningkatkan koordinasi antar panatia pelaksana pemilihan kepala desa, 3. Memastikan pelaksanaan Pilkades secara kondusif
6.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp0.00	Hasil Analisis Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa dan SOTK Perangkat Desa Belum Optimal	Bidang PKSB M	1. Sosialisasi dan pendanaan anggaran Belum Optimal 2. Gangguan sistem aplikasi / jaringan 3. Kapasitas SDM belum optimal 4. Perangkat Kerja belum optimal	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalka n Sosialisasi dan pendanaan anggaran 2. Memastikan sistem aplikasi / jaringan Mumpuni/Hand al 3. Mengoptimalka n Kapasitas SDM 4. Pemenuhan Perangkat Kerja
7.	Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	Rp99,000,000.00	Pelaksanaan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan	Bidang PKSB M	1. Sosialisasi dan pendampingan belum optimal 2. Pendanaan	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalka n Sosialisasi dan pendampingan

			Desa Belum Optimal		Anggaran belum optimal 3. Kapasitas SDM belum optimal 4. Perangkat Kerja belum optimal		2. Mengoptimalkan Pendanaan Anggaran 3. Peningkatan Kapasitas SDM 4. Pemenuhan Perangkat Kerja
8.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp0.00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa belum optimal	Bidang Pemdes	1. Monitoring dan evaluasi belum optimal 2. Perubahan regulasi aset desa 3. Implementasi aplikasi sipades 4. Penyusunan laporan aset desa yang belum tertib 5. Kapasitas Aparatur desa belum memadai	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, 2. Penyesuaian regulasi aset Desa, 3. Menertibkan laporan penyusunan aset desa, 4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa
9.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp0.00	Kapasitas Anggota BPD belum optimal	Bidang Pemdes	1. Perubahan regulasi yang dinamis 2. Pergantian anggota BPD yang dinamis 3. Keterbatasan anggaran pada OPD dalam pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD 4. Implementasi dan tindak lanjut hasil kapasitas anggota BPD belum optimal	Tidak tercapainya target kinerja	Memfasilitasi peningkatan kapasitas Anggota BPD
10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	1. Evaluasi perkembangan desa belum optimal 2. Tahapan pelaksanaan lomba yang belum optimal	Bidang Pemdes	1. Keterbatasan anggaran pelaksanaan lomba desa 2. Sosialisasi dan pembinaan yang belum optimal 3. Penginputan aplikasi Epdeskel yang belum tertib	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengajukan penambahan anggaran, 2. Mengoptimalkan sosialisasi dan pembinaan, 3. Menertibkan penginputan aplikasi Epdeskel

Table 3.25 Daftar Risiko Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				Total Anggaran : Rp318.637.615,30,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Koma Tiga Puluh Rupiah)			
N o.	Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko teridentifikasi	Pemilik risiko	Penyebab risiko	Dampak	Pengendalian yang ada
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taurana), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp0.00	Pelaksanaan Kapasitas LKD Belum Optimal	Bidang PKSB M	1. Sosialisasi dan Pendampingan Belum Optimal 2. Kapasitas SDM Belum Optimal 3. Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Peran LKD Belum Optimal 4. Pendanaan Anggaran belum optimal	Tidak tercapainya target kinerja	Memfasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan
2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp0.00	Pendapatan Asli Desa Belum Optimal	Bidang PKSB M	1. Pendampingan Pengembangan Potensi Desa Belum Optimal 2. Kapasitas SDM Pengerak Ekonomi Desa Belum Optimal 3. Dalam Perencanaan Usaha Desa/Kelurahan Belum Optimal	Tidak tercapainya target kinerja	1. Memfasilitasi pendampingan pengembangan potensi Desa 2. Pendampingan terhadap kegiatan perencanaan usaha desa

3.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp0.00	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum Optimal	Bidang PKSB M	1. Pola pembinaan berjenjang tidak dilaksanakan secara maksimal 2. Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Belum Optimal 3. Teknologi Tepat Guna belum termanfaatkan secara Optimal 4. Dukungan Anggaran dalam mendukung penyempurnaan Teknologi Tepat Guna belum optimal	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalkan Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2. Mengoptimalkan Dukungan Anggaran dalam mendukung penyempurnaan Teknologi Tepat Guna
4.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp0.00	Pelaksanaan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Belum Optimal	Bidang PKSB M	1. Sosialisasi dan pendampingan belum optimal 2. Pendanaan Anggaran belum optimal 3. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan Belum Optimal 4. Menurunnya Semangat Gotong	Tidak tercapainya target kinerja	1. Menggiatkan Program BBGRM di Desa

					Royong dan Kebersamaan (Pergeseran Pola Sosial Budaya Masyarakat) 5. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Belum Optimal		
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp318.637.615,30	Pelaksanaan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Belum Optimal	PKK	1. Pendampingan Kegiatan Belum Optimal 2. Peningkatan Kapasitas SDM Belum Optimal	Tidak tercapainya target kinerja	1. Mengoptimalkan Kegiatan Pendampingan TP PKK 2. Peningkatan Kapasitas SDM

Table 3.26 Daftar Risiko Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil sangat jarang terjadi, jarang terjadi, hampir/pasti terjadi dan sangat sering terjadi pada kegiatan tertentu.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi terhadap pencaapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

11. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :

Peta Risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

Matrik Analisis Risiko			Konsekuensi / Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Kurang signifikan	Signifikan tinggi	Sangat signifikan	Ekstrim
Kemungkinan	5	Pasti Terjadi					
	4	Hampir pasti terjadi			1	7	
	3	Kemungkinan besar terjadi		3	18		
	2	Kemungkinan kecil terjadi		1	3	3	
	1	Hampir mustahil terjadi					

Tabel 3.27. Peta risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tabel pemetaan risiko diatas dapat diketahui bahwa

1. Ada 7 sub kegiatan dengan Level Rendah, Risiko dapat diterima yaitu pada sub kegiatan:
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2. Ada 21 sub kegiatan dengan level risiko Sedang yaitu pada sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - j. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 - l. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - m. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - n. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - o. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 - p. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - q. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - r. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - s. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - t. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - u. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3. Ada 8 sub kegiatan dengan level risiko Tinggi yaitu pada sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - f. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 - h. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP), INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN

Sebagai bukti/bentuk penyelenggaraan tahapan SPIP disemua unsur dan adanya risiko Program kegiatan di dinas/badan dalam mencapai tujuan, disusun rencana tindak pengendalian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Rencana tindak pengendalian adalah serangkaian tindakan yang di lakukan untuk mengendalikan risiko yang ada dari daftar risiko yang sudah teridentifikasi.
2. Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif.
3. Pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa RTP serta informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemantauan dilakukan dalam *On Going Monitoring* yaitu pemantauan yang melekat dalam proses pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinu oleh atasan langsung.

Berdasarkan uraian identifikasi dan analisis risiko serta dari daftar risiko yang ada di dinas/badan Kabupaten Penajam Paser Utara berikut rencana tindak pengendalian yang di dalam nya ada informasi dan komunikasi serta pemantauan yang ada.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Total Anggaran : Rp98.300.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18,100,000.00	Dokumen yang tersusun tidak tepat waktu	Mengajukan Peningkatan kapasitas SDM dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Kepala Dinas	memberikan arahan kepada Perencanaan Program dan Keuangan untuk menyusun Dokumen Perencanaan DPMD agar tepat waktu	memastikan dokumen perencanaan Program yang kan diajukan telah siap	1 Bulan
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp80,200,000.00	Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam evaluais kinerja DPMD	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal dengan para pejabat struktural dan JAFUNG mengenai evaluasi Kinerja DPMD 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Melakukan Monitoring terhadap kinerja DPMD	1 bulan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Total Anggaran : Rp3.319.410.164,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,182,695,164.00	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan dan Terjadinya perubahan data ASN (mutasi data)	Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kendala yang ada	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal mengenai SDM 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Memastikan surat usulan penambahan Anggaran telah di tindak lanjuti oleh TAPD	6 bulan
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp129,840,000.00	Keterlambatan pembayaran honorarium	Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kendala yang ada dan Menyiapkan Dokumen Pengajuan Sedini Mungkin	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal mengenai SDM 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Memastikan surat usulan penambahan Anggaran telah di tindak lanjuti oleh TAPD	6 bulan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp6,875,000.00	Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD belum optimal	Memberikan Pemahaman kepada para PPTK untuk segera melakukan Kegiatan sesuai dengan Jadwal	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal mengenai SDM 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Memastikan surat usulan penambahan Anggaran telah di tindak lanjuti oleh TAPD	6 bulan

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						Total Anggaran : Rp284.378.927,70,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6,044,919.00	Tidak terpenuhinya sarana pendukung instalasi listrik	Melakukan kontrol berkala terhadap kebutuhan komponen instalasi listrik	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penanyangan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	3 Bulan
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp126,770,500.00	Tidak Terpenuhinya ATK pendukung administrasi perkantoran	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penanyangan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	3 Bulan
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp5,145,496.00	Tidak Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penanyangan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	3 Bulan

4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp19,137,000.00	Tidak Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penyanggahan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	3 Bulan
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3,060,000.00	Tidak tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah referensi jenis bahan bacaan dan buku peraturan terkait DPMD	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penyanggahan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	3 Bulan
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp38,000,000.00	Tidak terpenuhinya fasilitas makan minum tamu	melakukan renovasi ruang rapat	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penyanggahan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	3 Bulan
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp86.221.012,70	1. Rapat tidak terselenggara 2. Tidak dapat menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi	Mengadakan/mengikuti rapat via zoom jika memungkinkan	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal mengenai SDM 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Memastikan surat usulan penambahan Anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	3 Bulan

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Total Anggaran : Rp0,- (Nol Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0.00	Belum tersedianya barang yang sesuai spesifikasi	Melakukan pendataan dan pendaftaran dalam katalog lokal	Kepala Dinas	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mendorong percepatan penanyangan produk lokal melalui katalog lokal atau toko daring/e-marketplace	Pejabat pengadaan akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap etalase yang sudah ditambahkan oleh penyedia	2 bulan

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Total Anggaran : Rp796.167.416,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5,154,800.00	Pengadaan Materai tidak dapat terealisasi lengkap sesuai kebutuhan	Menghemat penggunaan ATK	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal mengenai SDM 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	3 Bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp92,262,616.00	1. Gangguan internet 2. Air tidak mengalir 3. Pemadaman Listrik	Membuat pengingat agar pembayaran tagihan tidak terlambat	Kepala Dinas	Membuat surat usulan penambahan anggaran ke TAPD	Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	3 Bulan

3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp698,750,000.00	Keterlambatan pembayaran honorarium THL	Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kendala yang ada	Kepala Dinas	1. Melakukan rapat internal mengenai SDM 2. Membuat surat usulan penambahan anggaran peningkatan kualitas SDM	Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	3 Bulan
----	--------------------------------	------------------	---	---	--------------	--	---	---------

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Total Anggaran : Rp107.434.640,- (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp78,734,640.00	Sarana dan prasarana kendaraan dinas belum optimal	Membuat pengingat agar pembayaran pajak tidak terlambat, serta mengecek secara berkala kondisi kendaraan	Kepala Dinas	Membuat surat usulan penambahan anggaran ke TAPD	Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	6 Bulan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28,700,000.00	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor belum optimal	Mengecek kondisi peralatan secara berkala dan menggunakan peralatan dengan bijak	Kepala Dinas	Membuat surat usulan penambahan anggaran ke TAPD	Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	6 Bulan
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0.00	Pemeliharaan gedung kantor belum optimal	Mengecek kondisi gedung secara berkala dan rutin melakukan pemeliharaan	Kepala Dinas	Membuat surat usulan penambahan anggaran ke TAPD	Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD	6 Bulan

7. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa						Total Anggaran : Rp29.856.600,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp29,856,600.00	terhambatnya proses Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Melengkapi administrasi dan menyesuaikan perubahan kebijakan dan regulasi.	Kepala Dinas	"1. Membuat surat kepada tim pemekaran desa, 2. Melakukan Rapat koordinasi"	"1. Memantau feed back dari tim pemekaran desa, 2. Membuat Berita Acara untuk ditindaklanjuti"	6 Bulan

8. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Desa

Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa						Total Anggaran : Rp219.995.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp219,995,000.00	Belum optimalnya pengembangan kerjasama desa	1. Pengumpulan dan pengolahan Data 2. Kunjungan kerja serta Monitoring dan evaluasi lapangan 3. Pelaksanaan Pendampingan dan Pembinaan	Kepala Dinas	1. Menyiapkan administrasi kegiatan 2. Membuat jadwal dan indikator monitoring dan evaluasi, 3. Melaksanakan rapat Koordinasi	1. Memastikan Administasi Kegiatan 2. Memastikan jadwal dan indikator monitoring dan evaluasi Tepat Waktu 3. adanya tindak lanjut berita acara rapat koordinasi	12 Bulan

9. Kegiatan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Total Anggaran : Rp703.140.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp594,000,000.00	1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum optimal 2. Keterlambatan pembayaran premi bulanan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, 2. meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait	Kepala Dinas	1. Membuat jadwal dan indikator monitoring dan evaluasi, 2. Melaksanakan rapat Koordinasi	1. Memastikan jadwal monitoring dan evaluasi terlaksana, 2. Memastikan adanya tindak lanjut berita acara rapat koordinasi	12 bulan
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp10,140,000.00	Pelaksanaan fasilitasi keuangan desa belum optimal	1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, 2. Mengoptimalkan pendampingan tim ADD, 3. Penyesuaian regulasi keuangan Desa, 4. Menertibkan laporan penyusunan keuangan desa, 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Kepala Dinas	1. Membuat jadwal dan indikator monitoring dan evaluasi, 2. Melaksanakan rapat Koordinasi, 3. Menyiapkan administrasi kegiatan	1. Memastikan jadwal monitoring dan evaluasi terlaksana, 2. Memastikan adanya tindak lanjut berita acara rapat koordinasi	12 bulan

3.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp0.00	Kapasitas aparatur pemerintah desa belum optimal	Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Mengidentifikasi kesiapan administrasi kegiatan	3 bulan
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp0.00	Struktur organisasi kurang efektif	Memfasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdes dan Lembaga Kerja	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Mengidentifikasi kesiapan administrasi kegiatan	3 Bulan
5.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp0.00	Proses Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berjalan dengan lancar	1. Mengoptimalkan sosialisasi dan pendampingan, 2. Meningkatkan koordinasi antar panatia pelaksana pemilihan kepala desa, 3. Memastikan pelaksanaan Pilkades secara kondusif	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Memastikan kesiapan administrasi	3 bulan
6.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp0.00	Hasil Analisis Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa dan SOTK Perangkat Desa Belum Optimal	1. Mengoptimalkan Sosialisasi dan pendanaan anggaran 2. Memastikan sistem aplikasi / jaringan Mumpuni/Handal 3. Mengoptimalkan Kapasitas SDM 4. Pemenuhan Perangkat Kerja	Kepala Dinas	1. Menyiapkan administrasi kegiatan 2. Merekapitulasi dan Memvalidasi Data Profil Desa	Memastikan kelengkapan administrasi dan Informasi Data	3 bulan
7.	Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa	Rp99,000,000.00	Pelaksanaan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Belum Optimal	1. Mengoptimalkan Sosialisasi dan pendampingan 2. Mengoptimalkan Pendanaan Anggaran	Kepala Dinas	1. Menyiapkan administrasi kegiatan 2. Merekapitulasi Data Desa	1. Memastikan kelengkapan administrasi dan Informasi Data 2. Memastikan	12 bulan

				3. Peningkatan Kapasitas SDM 4. Pemenuhan Perangkat Kerja		3. Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi	Pembaharuan Data dan Informasi Desa	
8.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp0.00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa belum optimal	1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, 2. Penyesuaian regulasi aset Desa, 3. Menertibkan laporan penyusunan aset desa, 4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Kepala Dinas	1. Membuat jadwal dan indikator monitoring dan evaluasi, 2. Melaksanakan rapat Koordinasi, 3. Menyiapkan administrasi kegiatan	1. Memastikan jadwal monitoring dan evaluasi terlaksana, 2. Memastikan adanya tindak lanjut berita acara rapat koordinasi	6 bulan
9.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp0.00	Kapasitas Anggota BPD belum optimal	Memfasilitasi peningkatan kapasitas Anggota BPD	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Mengidentifikasi kesiapan administrasi kegiatan	3 bulan
10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	1. Evaluasi perkembangan desa belum optimal 2. Tahapan pelaksanaan lomba yang belum optimal	1. Mengajukan penambahan anggaran, 2. Mengoptimalkan sosialisasi dan pembinaan, 3. Menertibkan penginputan aplikasi Epdeskel	Kepala Dinas	1. Membuat surat usulan penambahan anggaran, 2. meyiapkan administrasi kegiatan, 3. Mengidentifikasi penginputan Aplikasi Epdeskel	1. Memastikan surat usulan penambahan anggaran telah ditindaklanjuti oleh TAPD, 2. Memantau kesiapan administrasi kegiatan, 3. Memantau penginputan aplikasi Epdeskel	4 bulan

10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						Total Anggaran : Rp318.637.615,30,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Koma Tiga Puluh Rupiah)		
No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Risiko Teridentifikasi	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Informasi dan Komunikasi	Pemantauan	Target waktu
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taurna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp0.00	Pelaksanaan Kapasitas LKD Belum Optimal	Memfasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Mengidentifikasi kesiapan administrasi kegiatan	12 Bulan
2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp0.00	Pendapatan Asli Desa Belum Optimal	1. Memfasilitasi pendampingan pengembangan potensi Desa 2. Pendampingan terhadap kegiatan perencanaan usaha desa	Kepala Dinas	1. Menyiapkan administrasi kegiatan 2. Merekapitulasi Data Desa 3. Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi 4. Melakukan Koordinasi	1. Memastikan kelengkapan administrasi dan Informasi Data 2. Menindaklanjuti hasil koordinasi.	12 Bulan

						dengan OPD Teknis terkait		
3.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp0.00	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum Optimal	1. Mengoptimalkan Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2. Mengoptimalkan Dukungan Anggaran dalam mendukung penyempurnaan Teknologi Tepat Guna	Kepala Dinas	1. Menyiapkan administrasi kegiatan 2. Merekapitulasi Data Desa 3. Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi 4. Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait	1. Memastikan kelengkapan administrasi dan Informasi Data 2. Menindaklanjuti hasil koordinasi.	12 Bulan
4.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp0.00	Pelaksanaan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Belum Optimal	1. Menggiatkan Program BBGRM di Desa	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Memastikan kelengkapan administrasi dan Informasi Data	12 Bulan
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp318.637.615,30	Pelaksanaan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Belum Optimal	1. Mengoptimalkan Kegiatan Pendampingan TP PKK 2. Peningkatan Kapasitas SDM	Kepala Dinas	Menyiapkan administrasi kegiatan	Memastikan kelengkapan administrasi	12 Bulan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Manajemen Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang bersamaan dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Dokumen Manajemen Risiko yang berisi tentang Identifikasi Risiko, Daftar Risiko, Rencana Tindak Pengendalian, dan Peta Risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun sebuah laporan manajemen risiko. Penilaian risiko pada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara terkait kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyusunan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa;
8. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa;
9. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;

10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten /Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/ Kota.

Hasil dari penilaian risiko yang telah dilakukan ditemukan:

1. Ada 7 sub kegiatan dengan level risiko Signifikan Rendah, risiko dapat diterima;
2. Ada 21 sub kegiatan dengan level risiko Sedang, risiko dapat diterima;
3. Ada 8 sub kegiatan dengan level risiko Tinggi, membutuhkan penanganan selanjutnya.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat di berikan dalam penilaian risiko yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Analisis manajemen resiko harus dilakukan dalam kegiatan yang ada dan melakukan pemantauan risiko yang masih dapat di terima;
2. Dengan mengusulkan penambahan Anggaran, Sumber Daya Manusia, serta pemenuhan Sarana dan Prasarana agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar.